

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdullah, Saiful, 2009, *Hukum Aliran Sesat: Konsepsi Kebijakan Penal dan Non-Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, Malang: SETARA Press.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2004, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan Ketiga Edisi Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: BP Undip.
- Arsil, dkk., *Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Az, Lukman Santoso, dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum; Sejarah, Pengertian, Konsep Hukum, Aliran Hukum dan Penafsiran Hukum*, Malang: Setara Press.
- Bagir, Zainal Abidin, 2017, *Kerukunan dan Penodaan Agama: Alternatif Penanganan Masalah*, Yogyakarta, Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS).

- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darmadi, Sugianto, 1998, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Hiariej, Eddy O. S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- , 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kahmad, Dadang, 2002, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rodakarya.
- Kartapradja, Kamil, 1985, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masagung
- Khanif, Al, 2010, *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Lamintang, P. A. F., 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- , 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- , dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Todung M., 2005, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mahalliy, Al, dkk, 1990, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul Ayat*, Bandung: Sinar Baru.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan Kedelapan)*, Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2008, *KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.

-----, dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Nasution, Harun, 1979, *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI Press.

Pultoni, dkk, 2012, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Nama Agama*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Ricklefs, Merle Calvin, 2008, *Sejarah Indonesia Modern 1200—2008 (diterjemahkan dari A History of Modern Indonesia Since c. 1200 Fourth Edition)*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press.

Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel Jurnal

Amnesty International, 2017, “Amnesty International Report 2017/18 The State of the World’s Human Rights”, <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ENGLISH.PDF> diakses pada 1 Oktober 2018.

-----, 2014, “Mengadili Keyakinan: Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia”, <https://www.amnesty.org/>

download/Documents/208000/asa21012014in.pdf diakses pada 1 Oktober 2018.

Aqsa, Alghiffari, dkk, 2017, “Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2017 Redupnya Api Reformasi”, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/redupnya-api-reformasi-catatan-akhir-tahun-hukum-dan-ham-2017/> diakses pada 20 Oktober 2018.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_tentang_kuhp_dengan_lampiran.pdf diakses 14 November 2018.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), “Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16, No. 1, Maret 2016

Dirga, Sustira, dan Maidina Rahmawati, 2018, “Keluhan Bukan Kriminal: *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 1612/PID.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Tinggi Medan”, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, http://icjr.or.id/data/wpcontent/uploads/2018/09/Amicus-Meliana_Final_Maidina.pdf diakses pada 20 Oktober 2018.

Sihombing, Uli Parulian, dkk, 2012, “Ketidakadilan dalam Beriman Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia”, Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), http://advokasi.elsam.or.id/assets/2015/09/20120000_ketidakadilan-dalam-beriman_book-ilrc.pdf diakses pada 1 Oktober 2018.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Amin, Idi, 2007, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, http://eprints.undip.ac.id/17715/1/Idi_Amin.pdf diakses pada 1 Oktober 2018.

Hakim, Abdul, 2010, “Penerapan Hukum Pidana Dalam Perbuatan Melakukan Penistaan Agama”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Masnu'ah, Na'ilatul, 2015, "Politik Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia", *Tesis*, Program Magister Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Fitriana Murniati, 2007, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Administrasi Dalam Bidang Kesehatan Di Indonesia*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, http://eprints.undip.ac.id/17441/1/Fitriana_M..pdf diakses pada 16 Mei 2019.

Maurisa Zinira, 2013, *Politik Akomodasi Negara Terhadap Agama (Studi Kasus Penggunaan Fatwa MUI Sampang atas Syi'ah dalam Kasus Penodaan Agama)*, Tesis, Program Magister Agama dan Lintas Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, <http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/63750/potongan/S2-2013-324663-chapter1.pdf> diakses pada 19 Mei 2019.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726).

^{Undang}-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 1946.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 yang Telah Dicitak Ulang).

Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38).

^{Undang}-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 1946.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 April 2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787/K/Pid/2012 perihal perkara pidana pada peradilan tingkat kasasi atas nama terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha, 9 Januari 2013.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. perihal perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, 9 Mei 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor 463/Pid.B/2016/PN-Tjb. perihal perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama terdakwa Muhammad Ilham alias Ilham, 23 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor 457/Pid.B/2016/PN-Tjb. perihal perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama terdakwa Restu alias Panjang, 23 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor 458/Pid.B/2016/PN-Tjb. perihal perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama terdakwa Zainul Fahri alias Zainul, 23 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.b/2012/PN Spg perihal perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha, 12 Juli 2012.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 481/PID/2012/PT.SBY perihal perkara pidana pada peradilan tingkat banding atas nama terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha, 10 Agustus 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/PID.B/2018/PN Mdn. perihal perkara pidana pada peradilan tingkat pertama atas nama terdakwa Meliana, 4 Juni 2018.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 784/Pid/2018/PT MDN
perihal perkara pidana pada peradilan tingkat banding atas nama
terdakwa Meliana, 25 Oktober 2018.

F. Internet:

Institute for Criminal Justice Reform, 2019, “Mahkamah Agung Tolak Kasus
Meiliana, Lagi-lagi Preseden Buruk bagi Kebebasan Berpendapat dan
Kebebasan Beragama”, <https://icjr.or.id/mahkamah-agung-tolak-kasus-meiliana-lagi-lagi-preseden-buruk-bagi-kebebasan-berpendapat-dan-kebebasan-beragama>, diakses pada 19 Mei 2019.

KBBI Daring, “aga.ma”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agama> diakses
pada 14 November 2018.

-----, “percaya » ke.per.ca.ya.an”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepercayaan> diakses pada 14 November 2018.

-----, “se.nga.ja”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengaja>
diakses pada 24 April 2019.

-----, “umum”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/umum> diakses
pada 24 April 2019.

-----, “ce.ri.ta”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cerita> diakses
pada 24 April 2019.

-----, “anjur » meng.an.jur.kan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menganjurkan> diakses pada 24 April 2019.

-----, “usa.ha”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/usaha> diakses
pada 24 April 2019.

-----, “tafsir » pe.naf.sir.an”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penafsiran> diakses pada 24 April 2019.

-----, “simpang » me.nyim.pang”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyimpang> diakses pada 24 April 2019.

-----, “rasa » pe.ra.sa.an”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perasaan> diakses pada 24 April 2019.

-----, “mu.suh”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musuh> diakses
pada 24 April 2019.

-----, “salah guna » me.nya.lah.gu.na.kan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menyalahgunakan> diakses pada 24 April 2019.

-----, “noda » me.no.dai”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menodai> diakses pada 24 April 2019.

Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, “Keterangan Pers Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 026/Humas-KH/VIII/2016 tentang Peristiwa Penyerangan dan Pembakaran Rumah Ibadah di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, 11 Agustus 2016”, [https://www.komnasham.go.id/files/20160811-keterangan-pers-peristiwa-penyerangan-\\$N8M.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20160811-keterangan-pers-peristiwa-penyerangan-$N8M.pdf) diakses pada 20 Oktober 2018.

Oxford Dictionaries, “policy”, <https://id.oxforddictionaries.com/terjemahkan/inggris-indonesia/policy>, diakses pada 8 November 2018.

-----, “ciminal”, <https://id.oxforddictionaries.com/terjemahkan/inggris-indonesia/criminal> diakses pada 8 November 2018.